

**UPAYA KOMUNIKASI ORGANISASI
ANGGOTA BAGDALOPS BIRO OPERASI POLDA DIY
DALAM MENGHIMPUN LAPORAN KEJADIAN
GANGGUAN KAMTIBMAS DI WILAYAH D.I. YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun sebagai tugas akhir memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) pada Program studi Ilmu Komunikasi
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Yogyakarta



Disusun Oleh :

**Nama : SURAKHMAN WIDYANTO
NIM : 20530009**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022



PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Program Studi Ilmu Komunikasi,
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta :

Pada hari : Selasa

Tanggal : 8 Februari 2022

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

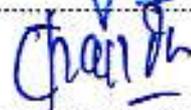
Nama

Tanda Tangan

1. Habib Muhsin, S.Sos., M.Si

2. Ade Chandra, S.Sos., M.Si

3. Dr. Irsasri, M.Pd


.....

.....

.....

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

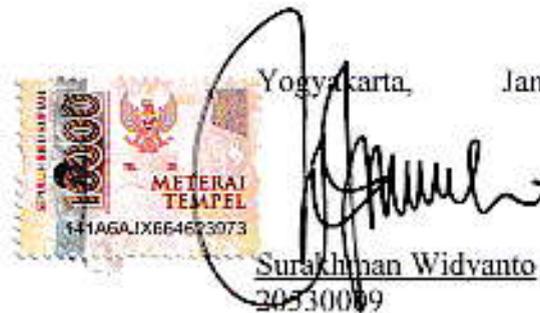
2022



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan tersebut dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Januari 2022



Surakhman Widvanto
20230009

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Upaya Komunikasi Organisasi Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dalam Menghimpun Laporan Kejadian Gangguan Kamtibmas di Wilayah D.I. Yogyakarta”**.

Skripsi ini merupakan laporan kegiatan penelitian penulis yang dilaksanakan di Bagdalops Biro Operasi Polda DIY, dalam rangka sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan kerja sama berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta yang secara resmi memberikan ijin penelitian lapangan maupun fasilitas-fasilitas lain yang bersangkutan dengan penulisan skripsi ini.
2. Habib Muhsin, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah memberikan masukan-masukan yang berguna dalam penulisan

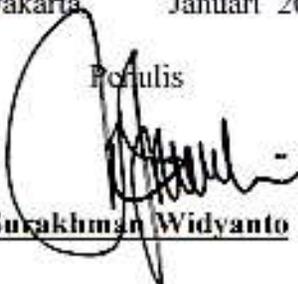
skripsi ini, dan selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan tenaga, pemikiran dan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap penulisan skripsi ini.

3. Komisaris Besar Polisi Istiyono S.H., selaku Kepala Biro Operasi Polda DIY yang telah memberikan ijin penelitian di Bagdalops Biro Operasi Polda DIY.
4. Kepala Bagian Pengendalian Operasi (Kabagdalops) Biro Operasi Polda DIY, Kasubbagpullahjianta Bagdalops, Perwira Siaga Bagdalops, Staf Subbagpulahjiantan Bagdalops dan Bintara Siaga Bagdalops Biro Operasi Polda DIY yang telah rela meluangkan waktu dan pikirannya sebagai responden dalam penelitian ini.
5. Istriku tercinta Pretiwi Ari serta kedua putraku Esa dan Khairul, yang telah memberikan dorongan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan memberikan tambahan pengetahuan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna peningkatan penulisan yang lebih baik di masa mendatang.

Yogyakarta Januari 2022

Penulis


Sugakman Widyanto

ABSTRAK

STPMD “APMD” Yogyakarta
Program Studi Ilmu Komunikasi
2022

Surakhman Widyanto (20530009)

UPAYA KOMUNIKASI ORGANISASI ANGGOTA BAGDALOPS BIRO OPERASI POLDA DIY DALAM MENGHIMPUN LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KAMTIBMAS DI WILAYAH D.I. YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai upaya komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dalam menghimpun laporan kejadian Gangguan Kamtibmas di wilayah D.I. Yogyakarta. Banyaknya kejadian Gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah D.I. Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan masyarakat di DIY. Bagdalops Biro Operasi Polda DIY yang bertugas sebagai penghimpun data kejadian Gangguan Kamtibmas, yang bisa memberikan masukan kepada Pimpinan Polri sehingga langkah-langkah dan kebijakan dapat diambil untuk menciptakan D.I. Yogyakarta yang aman, nyaman dan kondusif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, dimana peneliti menggambarkan suatu keadaan obyek penelitian yang sebenarnya pada saat dilakukan penelitian. Metode ini dipilih guna mendapatkan segala macam yang berkaitan dengan upaya komunikasi organisasi Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY, dan peneliti mengambil 7 sampel sebagai salah satu cara peneliti mengupas dan menelitinya dengan menggunakan teknik wawancara. Sebuah cara komunikasi yang dilakukan hasil pemikiran dari masing-masing Anggota, dari sanalah peneliti akan mendapatkan realita sebuah upaya komunikasi organisasi, hambatan dan upaya mengatasi hambatan tersebut dalam usaha menghimpun data kejadian Gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah D.I. Yogyakarta.

Kata-kata Kunci : Upaya Komunikasi, Organisasi, Gangguan Kamtibmas, Bagdalops Biro Operasi Polda DIY

MOTTO

*Tidak ada kata terlambat selagi ada niat dan kemauan yang kuat
untuk berbenah dan berbuat kebaikan antar sesama.*

(Surakhman Widyanto)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

D.I Yogyakarta adalah salah satu daerah istimewa yang setingkat dengan 34 propinsi yang ada di Indonesia, terletak di pulau Jawa bagian tengah. Batas wilayah D.I. Yogyakarta, di bagian selatan dibatasi lautan Indonesia, di bagian timur laut dibatasi Kabupaten Klaten, di bagian tenggara dibatasi Kabupaten Wonogiri, di bagian barat dibatasi Kabupaten Purworejo dan di bagian utara dibatasi Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali. Posisi D.I. Yogyakarta terletak antara $7^{\circ}.33-8^{\circ}.12$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}.00-110^{\circ}.50$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas $3.185,80 \text{ Km}^2$ atau $0,17\%$ dari luas Indonesia ($1.860.359,67 \text{ Km}^2$), luas laut 12 mil seluas $2.440,8 \text{ Km}^2$. Adapun luas masing-masing kabupaten adalah; Kabupaten Kulon Progo $586,27 \text{ Km}^2$ ($18,40\%$), Kabupaten Bantul $506,85 \text{ Km}^2$ ($15,91\%$), Kabupaten Gunung Kidul $1.485,36 \text{ Km}^2$ ($46,63\%$), Kabupaten Sleman $574,82 \text{ Km}^2$ ($18,04\%$) dan Kota Yogyakarta $32,50 \text{ Km}^2$ ($1,02\%$) (*Data BPS DIY tahun 2014*).

Wilayah D.I. Yogyakarta terdiri dari wilayah daratan, pantai dan pegunungan yang terbagi dalam 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tipe iklim tropis basah dengan curah hujan bervariasi

diantara 1.500 mm s/d 4.500 mm. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni s/d Oktober sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November s/d Mei. Jumlah penduduk \pm 3.882.288 jiwa (BPS DIY, 2020) dengan komposisi relatif heterogen berasal dari berbagai penjuru wilayah Indonesia. Penganut agama di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi berbagai macam agama yaitu Islam (mayoritas) diikuti Nasrani, Hindu, Budha dan sebagian penganut Aliran Kepercayaan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota disusul Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

D.I. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya dan kota pariwisata, dimana terdapat 130 perguruan tinggi dengan berbagai jenis perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Selain itu juga kaya akan budaya, dengan bukti peninggalan yang beraneka ragam, baik berupa monumen ataupun bangunan peninggalan bersejarah/cagar budaya dan adat istiadat serta tradisi yang masih konsisten dilestarikan. Namun demikian semakin meningkat dan kompleksnya situasi dan kondisi wilayah D.I. Yogyakarta menjadi salah satu faktor penyebab sering terjadinya berbagai macam gangguan kamtibmas, baik berupa kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, korupsi dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, serta terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, puting beliung, erupsi Gunung Merapi dan lain sebagainya.

Polda D.I. Yogyakarta dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas sebagai aparaturnegara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dituntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum D.I. Yogyakarta.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan tugas Polri, yang meliputi perkembangan aspek kehidupan di D.I. Yogyakarta di bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan (Poleksosbudkam). Sedangkan dari aspek Sumber Daya Alam (SDA) D.I. Yogyakarta memiliki luas kawasan hutan 17.053,5200 Ha. Pada sektor pertanian dan perkebunan, potensi pertanian tersebar di seluruh daerah D.I. Yogyakarta dengan komoditas utama padi, palawija, dan hortikultura. Selain itu di sektor perkebunan, terdapat banyak potensi diantaranya tembakau, kelapa dan tebu. Potensi sumber daya mineral atau tambang yang ada di D.I. Yogyakarta adalah bahan galian C yang meliputi pasir, kerikil, batu gamping, kalsit, kaolin, seolin serta breksi batu apung. Di sektor kelautan dan perikanan D.I. Yogyakarta memiliki luas wilayah 318.580 Ha dengan garis pantai 113 Km menjadikan D.I. Yogyakarta merupakan daerah potensi sumber daya

perikanan. Produksi nelayan di laut selatan pulau Jawa sebesar 52.814,9 ton/tahun (95,1% budidaya kolam, dan 4,9% perikanan laut).

Wilayah D.I. Yogyakarta terletak di jalur lintas selatan yang berpotensi sebagai pintu gerbang masuknya pelaku kejahatan di berbagai bidang. Selain itu banyaknya mahasiswa juga akan memicu maraknya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, LSM dan organisasi masyarakat lainnya yang memprotes tentang penanganan kasus korupsi, penggelapan pajak, kebijakan impor bahan pokok pangan, reformasi birokrasi, pemberian lapangan pekerjaan, biaya kesehatan dan pendidikan, dan lain lainnya yang akan terus berlanjut sampai pemerintah menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dengan banyaknya mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang menimba ilmu di D.I. Yogyakarta, maka juga akan menimbulkan konflik horizontal seperti keributan antara warga dengan mahasiswa pendatang, dan terjadinya perkelahian/tawuran antar mahasiswa maupun pelajar.

Karena banyaknya populasi di D.I. Yogyakarta, sehingga makin banyak juga pergerakan manusia dari tempat yang satu ke tempat lainnya, akan berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas karena bertambahnya jumlah kendaraan bermotor terutama roda 2 dan kesadaran berlalu lintas yang belum semuanya sadar.

Polri sebagai salah satu aparaturnegara yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang pelayanan, perlindungan dan pengayoman

kepada masyarakat, sebagai salah satu perwujudan dari Grand Strategi Polri (2005 – 2025). Grand Strategi Polri terbagi dalam tiga tahapan yang mencerminkan upaya Polri secara menyeluruh untuk mencapai hasil akhir berupa out put dari pekerjaan Polri secara utuh. Tahap I adalah *Trust Building* (2005 – 2009), keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya memerlukan dukungan dan kerjasama masyarakat dengan landasan kepercayaan (*trust*). Tahap II adalah *Partnership Building* (2010 – 2014), merupakan kelanjutan dari tahap pertama, dimana perlu dibangun kerjasama dengan berbagai pihak baik kementerian maupun lembaga yang terkait dengan pekerjaan Polri. Adapun Tahap III adalah *Strive For Excellence* (2015 – 2025), yaitu membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat, pada tahap ini kebutuhan masyarakat akan lebih mengharapkan pelayanan multi dimensional yang efektif dan efisien.

Sebagai rumusan program kerja Polri ke depan harus mengacu pada Grand Strategi, sedangkan proses menuju pencapaian out put pekerjaan Polri telah disusun dalam 3 program akselerasi yaitu, Keberhasilan Program (*Sustainability Program*), Peningkatan kualitas kinerja (*Performance Quality Improvements*), dan Komitmen terhadap organisasi (*Organizational Commitment*). Dari ketiga program akselerasi tersebut merupakan wujud penjabaran dari Grand Strategi Polri.

Sejak kepemimpinan Polri di jabat oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, Beliau mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Polri Presisi. PRESISI merupakan kependekan dari kata “Prediktif, Responsibilitas

dan Transparansi Berkeadilan”, hal ini dikandung maksud pada kepemimpinan Polri ke depan mencakup empat kebijakan utama yakni (A) Transformasi Organisasi; (B) Transformasi Operasional; (C) Transformasi Pelayanan Publik; dan (D) Transformasi Pengawasan.

D.I. Yogyakarta sebagai Sentra Budaya dan Wisata, Miniatur Indonesia, Barometer Politik dan sebagai Sentra Pendidikan, berdampak terhadap meningkatnya kepadatan penduduk yang heterogen, sehingga berdampak timbulnya gangguan kamtibmas yang kompleks dan beragam. Dampak dari bentuk gangguan kamtibmas tersebut adalah masyarakat menjadi korban kejahatan, penipuan, penjambratan, penculikan dan berbagai tindak pidana lainnya.

Di saat masyarakat menjadi korban kejahatan, langkah yang harus diambil adalah melaporkan kejadian yang telah menyimpannya kepada Polisi, sehingga langkah-langkah tindakan kepolisian bisa segera dilakukan. Polda D.I. Yogyakarta dan Jajarannya mempunyai fungsi yang bertugas dalam menerima laporan maupun pengaduan masyarakat terkait tindak pidana atau kejahatan yang dialami oleh masyarakat. Sehingga laporan dari tindak pidana atau kejahatan yang dialami masyarakat akan dihimpun dan didatakan oleh Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops) Biro Operasi Polda D.I. Yogyakarta setiap harinya untuk dilaporkan kepada Pimpinan maupun satuan atas (Mabes Polri) guna menentukan kebijakan strategis.

Dengan adanya kejadian gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah D.I. Yogyakarta, maka Bagdalops Biro Operasi Polda DIY menjadi satu-

satunya pusat informasi yang berkaitan dengan data gangguan kamtibmas yang terjadi, untuk dilaporkan/disajikan kepada Pimpinan Polda DIY maupun satuan tingkat atas yaitu Mabes Polri. Mengingat perkembangan yang semakin kompleks dan kejadian gangguan kamtibmas yang semakin banyak, menimbulkan kesulitan bagi Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dalam menghimpun dan mendatakan laporan sesegera mungkin. Di sisi lain, kecepatan dan ketepatan serta keakuratan data yang dihimpun oleh Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY merupakan kewajiban yang harus dijalankan demi penyajian data kepada Pimpinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk menelitinya terkait upaya komunikasi organisasi Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dalam menghimpun laporan kejadian gangguan kamtibmas di wilayah D.I. Yogyakarta.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana upaya komunikasi organisasi Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dalam menghimpun laporan kejadian gangguan kamtibmas di wilayah D.I. Yogyakarta?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan upaya komunikasi Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dalam menghimpun

laporan kejadian gangguan kamtibmas. Namun secara spesifik tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan kejelasan tentang :

1. Mengetahui upaya komunikasi organisasi Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dalam menghimpun laporan kejadian gangguan kamtibmas di wilayah D.I. Yogyakarta.
2. Mengetahui kendala apa yang dihadapi Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dalam menghimpun laporan kejadian gangguan kamtibmas.
3. Mengetahui upaya Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat akademik :
 - a. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Perpustakaan STPMD “APMD” Yogyakarta terutama untuk memperbanyak referensi bagi mahasiswa yang membacanya.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan bagi masyarakat yang membacanya.
2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebuah masukan dan pertimbangan bagi pimpinan Polda DIY dan khususnya kepada anggota Polri yang bertugas di Bagdalops Biro Operasi Polda

DIY dalam menerapkan strategi komunikasi organisasi sehingga tugas-tugasnya dalam menghimpun data kejadian Gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah D.I. Yogyakarta dapat diperoleh dengan cepat dan mudah.

E. KAJIAN TEORI

Dalam melakukan penelitian, tanpa ada dasar atau landasan yang menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakannya maka arah dari penelitian tersebut tidak jelas. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai landasan untuk menentukan arah penelitian. Istilah landasan penelitian dalam penelitian biasanya disebut kerangka atau kajian teori. Dalam penelitian kerangka teori mutlak harus digunakan.

1. Komunikasi

Istilah komunikasi berasal dari perkataan Latin "*communicatio*" yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Istilah *communicatio* tersebut bersumber dari kata "*communis*" yang berarti sama, yang dimaksud dengan sama di sini ialah sama makna atau pendapat. Dalam perkembangan selanjutnya komunikasi diartikan sebagai proses mentransfer fakta, data atau informasi yang dikemas sebagai pesan dari satu pihak, yang biasa disebut pengirim, kepada pihak lain sebagai penerima. Dengan diterimanya pesan tersebut diharapkan oleh pengirim, agar penerima dapat memahami, dapat menerima atau menyetujui pesan

yang ditransfer dan terjadi persamaan pendapat antara “pengirim” dan “penerima”.

a. Pengertian Komunikasi

Pengertian komunikasi dari beberapa ahli adalah sebagai berikut :

Janis & Kelley (Mulyana, 2002), komunikasi itu sendiri adalah suatu proses melalui mana seseorang (komuni dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku kator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) orang-orang lainnya (khalayak).

Lain halnya dengan Harold Laswell, cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : *Who, Says, What, in Which Channel*, saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana? (Mulyana, 2002 : 62). Sedangkan menurut Josep A. Devito (Mulyana, 2002), komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang, atau diantara kelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik dalam berkomunikasi secara seketika.

Dari pengertian di atas bahwa komunikasi adalah proses penyampaian lambang, pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media atau secara langsung, sehingga menimbulkan beberapa efek atau umpan balik.

b. Unsur-Unsur Komunikasi

Menurut Harold D. Laswell “komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (dalam Effendy, 2000 : 10)”. Komunikasi dapat berjalan dengan baik karena meliputi 5 unsur yaitu :

1) Pengirim (*communicator*)

Pengirim atau Komunikator adalah orang yang memiliki informasi dan kehendak untuk menyampaikannya kepada orang lain. Pengirim atau komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan.

2) Pesan (*message*)

Pesan yaitu pernyataan yang didukung oleh lambang, ide, opini, informasi dan lain sebagainya. Pesan adalah informasi yang hendak disampaikan pengirim kepada penerima. Sebagian besar pesan dalam bentuk kata, baik berupa ucapan maupun tulisan. Akan tetapi beraneka ragam perilaku non-verbal dapat juga digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti gerakan tubuh, raut muka dan lain sebagainya.

3) Saluran (*media, channel*)

Saluran atau sering juga disebut dengan media adalah alat, dimana pesan berpindah dari pengirim ke penerima. Saluran merupakan jalan yang dilalui informasi secara fisik.

4) Penerima (*communicant*)

Penerima adalah orang yang menerima informasi dari pengirim. Penerima melakukan proses penafsiran atas informasi yang diterima dari pengirim.

5) Efek (*effect*)

Efek adalah pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pengirim kepada penerima.

Dari kelima unsur komunikasi tersebut di atas, sehingga Lasswell mengemukakan paradigma yaitu, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa (*who*), mengatakan apa (*says what*), dengan saluran apa (*in which channel*) kepada siapa (*to whom*), dengan akibat atau hasil apa (*with what effect*). (dalam Effendy, 2000 : 10)

c. Media Komunikasi

Dalam proses komunikasi telah diutarakan bahwa pengiriman suatu pesan disampaikan melalui saluran media komunikasi. Media komunikasi merupakan sarana yang dipergunakan dalam proses pengiriman pesan. Media komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan itu dapat berupa :

- a. Media Tulisan; Berupa surat, telegram, papan pengumuman, majalah, surat kabar dan lain-lain.
- b. Media Visual; berbentuk gambar, grafik, foto dan lain-lain.
- c. Media Audio; berupa suara seperti telepon, radio dan lain-lain.
- d. Media Audio Visual; berupa kombinasi gambar dan suara, contohnya televisi dan film.

2. Strategi Komunikasi

Pengertian strategi komunikasi menurut Muhammad Arni (2004 : 65-66) adalah paduan antara perencanaan komunikasi (communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung situasi dan kondisi, jadi dengan demikian strategi komunikasi adalah keseluruhan perencanaan, taktik, cara yang akan dipergunakan guna melancarkan komunikasi dengan memperhatikan keseluruhan aspek yang ada pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, menurut Anwar Arifin (2010) di dalam bukunya Ilmu Komunikasi, Sebagai Pengantar Ringkas, ia menyatakan bahwa :
Sesungguhnya strategi ialah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan

strategi komunikasi berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa depan, guna mencapai efektifitas. Dengan strategi komunikasi ini, berarti dapat ditempuh beberapa cara memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat.

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tertentu, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy, 1981 : 84).

Menurut Gibson, dkk dalam strategi komunikasi perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut (Ulbert. 2007: 228) :

a. Mendorong saling mempercayai

Komunikasi itu dimulai dari suasana saling percaya yang diciptakan antara komunikator dan komunikan. Kalau tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi tidak akan berhasil. Tidak adanya rasa saling percaya akan menghambat komunikasi.

b. Meningkatkan umpan balik

Kesalahpahaman dapat dikurangi jika proses umpan balik dilakukan dengan baik. Mekanisme umpan balik dalam organisasi sama pentingnya dengan komunikasi antarpribadi. Seorang komunikator memerlukan adanya mekanisme umpan balik sehingga mereka tahu apakah pesannya sudah dipahami oleh komunikan.

c. Mengatur arus informasi

Mengatur arus informasi agar tidak memberikan beban informasi kepada pihak komunikan. Hanya informasi penting dan yang diperlukan oleh komunikan yang disampaikan. Komunikasi diatur mutunya, jumlahnya, dan cara penyampaiannya. Informasi yang disampaikan harus sistematis, ringkas dan memiliki bobot kepentingan yang cukup.

d. Pengulangan

Pengulangan membantu komunikan untuk menginterpretasikan pesan yang tidak jelas atau terlalu sulit untuk dapat dipahami pada saat pertama kali didengar. Bagi seorang manajer, permasalahan-permasalahan penting yang tidak disampaikan kepada bawahan dapat diulangi paling tidak dua atau tiga kali.

e. Menggunakan bahasa yang sederhana

Bahasa yang kompleks, istilah-istilah teknis dan jaringan menyebabkan komunikasi sulit dipahami oleh komunikan. Hampir setiap gagasan dapat disampaikan dalam bahasa yang sederhana sehingga setiap orang dapat memahaminya.

f. Penetapan waktu

Suatu permasalahan dalam komunikasi di mana komunikator mulai menyampaikan pesan pada saat penerima belum siap untuk mendengarkannya. Beberapa orang menjumpai bahwa pesan yang disampaikan kepadanya tidak sistematis sehingga mereka tidak dapat

menghubungkan satu topik dengan topik yang lain secara sistematis. Oleh karenanya cara yang tepat adalah dengan mengelola waktu untuk berkomunikasi sehingga pesan yang disampaikan tersusun dengan baik, ringkas dan mudah dipahami.

Jadi strategi komunikasi adalah suatu cara rencana dasar yang menyeluruh dari rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa sasaran dengan memiliki sebuah paduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*management communication*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal menurut DeVito (2013) adalah komunikasi yang terjadi diantara dua orang yang telah memiliki hubungan yang jelas, yang terhubungkan dengan beberapa cara. Jadi komunikasi interpersonal misalnya komunikasi yang terjadi antara ibu dengan anak, dokter dengan pasien, dua orang dalam suatu percakapan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Deddy Mulyana (2005), menyatakan : “komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*) adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal”. Dengan demikian, karakteristik

komunikasi interpersonal adalah terjadi diantara dua orang yang memiliki hubungan yang jelas, berlangsung secara tatap muka, bersifat interaktif dimana para pelaku komunikasi dapat saling bereaksi satu sama lain.

4. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok (*group communication*) yaitu komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Menurut Michael Burgoon dan Michael Ruffner dalam Sendjaja (1994) memberi batasan komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat.

Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok.

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Deddy Mulyana, 2005). Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok, juga melibatkan komunikasi antarpribadi. Karena itu kebanyakan teori komunikasi antarpribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok.

5. Komunikasi Organisasi

a. Pengertian Komunikasi Organisasi

Menurut Redding dan Sanborn mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward atau komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi upward atau komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau komunikasi dari orang-orang yang sama level/tingkatnya dalam organisasi, keterampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis dan komunikasi evaluasi program. (Muhammad. 2008: 65)

Sedangkan menurut Goldhaber (1986) komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Defenisi ini mengandung tujuh konsep kunci yaitu proses, pesan, jaringan, saling tergantung, hubungan, lingkungan dan ketidakpastian. (Muhammad. 2008: 67)

Pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi ditunjang oleh pernyataan Robbins dan Jones yang mengungkapkan bahwa organisasi modern adalah suatu struktur yang kompleks dari berbagai ragam kegiatan yang hanya dengan komunikasi, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diatur dan dipersatukan untuk mencapai suatu tujuan. (Soemirat. 1999: 213)

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan hal penting dalam suatu organisasi seperti dalam hal penyusunan rencana kerja, pembagian tugas bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya melalui pola pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan, media apa

yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan sebagainya. William V. Hanney dalam bukunya *Communication and Organizational Behavior*, menyatakan organisasi terdiri atas sejumlah orang; ia melibatkan keadaan saling bergantung; kebergantungan memerlukan koordinasi; koordinasi mensyaratkan komunikasi. Oleh karena itu kata William V. Hanney, komunikasi adalah suatu sine qua non bagi organisasi. (Onong. 2005: 116)

Dari beberapa pendapat diatas, maka jelas bahwa komunikasi merupakan jantung dari suatu organisasi, kegiatan organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Melalui komunikasi yang efektif, kerjasama yang harmonis dapat ditumbuhkan, dipelihara dan dikembangkan untuk pencapaian tujuan organisasi.

b. Fungsi Komunikasi dalam Organisasi

Menurut Sendjaja (Burhan. 2011:278), organisasi baik yang berorientasi untuk mencari keuntungan (profit) maupun nirlaba (non-profit), memiliki empat fungsi organisasi, yaitu: fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Keempat fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1) Fungsi Informatif

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem proses informasi (information-processing system). Maksudnya, seluruh

anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu.

Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan (bawahan) membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan, di samping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti dan sebagainya.

2) Fungsi Regulatif

Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Pertama, atasan atau orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Disamping itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberi instruksi atau perintah, sehingga dalam struktur organisasi kemungkinan mereka ditempatkan

pada lapis atas (*position of authority*) supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian, sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak bergantung pada :

- a) Keabsahan pimpinan dalam menyampaikan perintah
- b) Kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi
- c) Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pimpinan sekaligus sebagai pribadi
- d) Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan

Kedua, berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh untuk dilaksanakan.

3) Fungsi Persuasif

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk memersuasi bawahannya dari pada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.

4) Fungsi Integratif

Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut (newsletter, bulletin) dan laporan kemajuan organisasi; juga saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antarpribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi.

c. Aliran Komunikasi dalam Organisasi

Aliran komunikasi dalam organisasi merupakan pedoman kemana seseorang dapat berkomunikasi. Aliran komunikasi formal dalam organisasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan horizontal

1) Komunikasi dari atas ke bawah (upward communication)

Komunikasi dari atas ke bawah merupakan aliran komunikasi dari tingkat atas ke tingkat bawah melalui hierarki organisasi. Bentuk aliran komunikasi dari atas ke bawah berupa prosedur organisasi, instruksi tentang bagaimana melakukan tugas, umpan balik terhadap prestasi bawahan, penjelasan tentang tujuan organisasi, dan lain sebagainya. Salah satu kelemahan komunikasi dari atas ke bawah adalah ketidakakuratan informasi karena harus melewati beberapa tingkatan. Pesan yang disampaikan dengan suatu bahasa yang tepat untuk

suatu tingkat, tetapi tidak tepat untuk tingkat paling bawah yang menjadi sasaran dari informasi tersebut.

2) Komunikasi dari bawah ke atas (downward communication)

Komunikasi dari bawah ke atas dirancang untuk menyediakan umpan balik tentang seberapa baik organisasi telah berfungsi. Bawahan diharapkan memberikan informasi tentang prestasinya, praktik serta kebijakan organisasi. Komunikasi dari bawah ke atas dapat berbentuk laporan tertulis maupun lisan, kotak saran, pertemuan kelompok dan lain sebagainya.

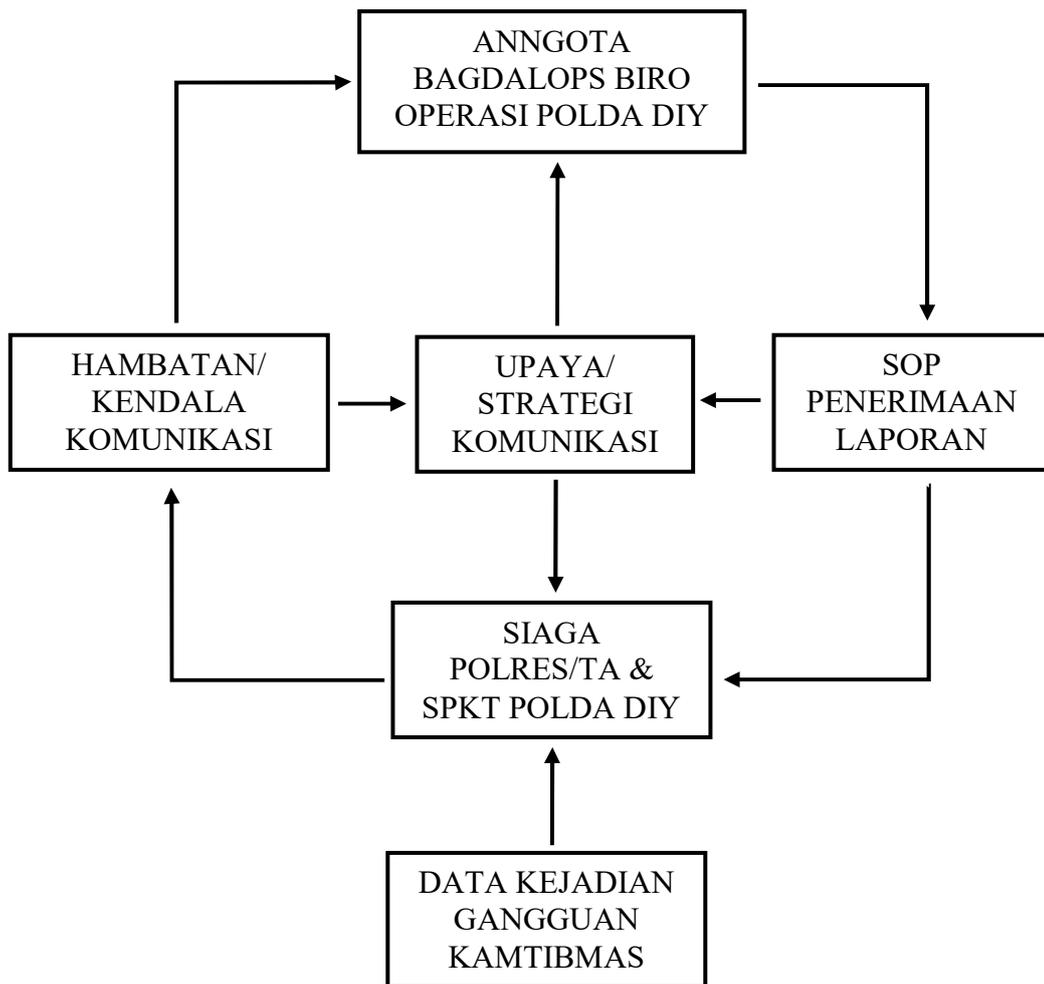
Permasalahan utama yang terjadi dalam komunikasi dari bawah ke atas adalah bias dan penyaringan atas informasi yang disampaikan oleh bawahan. Komunikasi dari bawah ke atas digunakan untuk memonitor prestasi organisasi. Bawahan seringkali memberikan informasi yang kurang benar kepada atasannya, terutama untuk informasi yang tidak mengenakkan. Akibatnya, komunikasi dari bawah ke atas seringkali dikatakan sebagai penyampaian informasi yang menyenangkan atasan dan bukan informasi yang perlu diketahui oleh atasan.

3) Komunikasi horizontal

Komunikasi horizontal merupakan aliran komunikasi kepada orang-orang yang memiliki hierarki yang sama dalam suatu organisasi, misalnya komunikasi yang terjadi antara manajer bagian pemasaran dengan manajer bagian produksi atau antara karyawan bagian produksi dengan karyawan bagian keuangan.

F. KERANGKA PIKIR

Agar langkah-langkah dalam penelitian menjadi terarah dan sistimatis, maka perlu diagram alur sebagai kerangka pikir. Adapun diagram alur yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Keterangan : (Panah) : Menunjukkan arah adanya siklus (perputaran) dari satu item pemikiran ke item pemikiran berikutnya yang mempunyai kedudukan dan hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan

sedangkan (Kotak) : Menunjukkan item-item pemikiran.

Penjelasannya : Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) menghimpun data dari Polres/Polresta maupun Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda DIY terkait kejadian gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah DIY. Dalam pelaksanaan menghimpun data, Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY menerapkan strategi/upaya sehingga laporan yang diinginkan dapat terpenuhi. Di dalam proses pencarian data kendala/hambatan apa saja yang muncul dalam proses komunikasi dengan penyedia data.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang diartikan sebagai prosedur penelitian yang diselidiki, dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Metode deskriptif bertugas untuk melakukan kajian obyektif mengenai gejala-gejala sebagai data sebagaimana adanya. Data itu harus diiringi dengan pengolahan agar didapatkan penafsiran yang kuat dan obyektif.

Menurut Burhan Bungin pada Sosiologi Komunikasi (2011 : 307) metode penelitian kualitatif mencakup berbagai metodologi yang fokusnya menggunakan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap

pokok kajiannya (*subject of matter*). Oleh karena itu, dalam penggunaan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha melakukan studi gejala dalam keadaan ilmiahnya dan berusaha membentuk pengertian terhadap fenomena sesuai dengan makna yang lazim digunakan oleh subjek penelitian.

Menurut Crasswell pada Burhan Bungin (2011), beberapa asumsi dalam pendekatan kualitatif yaitu, pertama, peneliti lebih memperhatikan proses daripada hasil. Kedua, peneliti lebih memperhatikan interpretasi, ketiga, peneliti merupakan alat utama dalam mengumpulkan data dan analisis data serta peneliti harus terjun langsung ke lapangan. Keempat, menggambarkan bahwa peneliti terlibat dalam proses penelitian, interpretasi data, dan pencapaian pemahaman melalui kata atau gambar. Kelima, bersifat induktif dimana peneliti membuat konsep, hipotesa dan teori berdasarkan data lapangan yang diperoleh saat penelitian serta terus mengembangkannya di lapangan dalam proses “jatuh-bangun”.

Metode deskriptif dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana strategi komunikasi organisasi Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dalam menghimpun laporan kejadian gangguan kamtibmas di wilayah DIY.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di kantor Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops) Biro Operasi Polda D.I. Yogyakarta,

Jln. Padjajaran, Condong Catur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55283.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena Bagdalops Biro Operasi Polda DIY merupakan unit fungsi kepolisian yang berada di Polda DIY dan bertugas sebagai penghimpun laporan dari Satuan Kewilayahan maupun dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda DIY untuk dilaporkan kepada Pimpinan Polda DIY maupun Satuan tingkat atas (Mabes Polri).

3. Sumber Data

a. Informan

Pada penelitian ini yang menjadi informan (sumber informasi) adalah personil Polri yang bertugas di Bagdalops Biro Operasi Polda DIY, antara lain : Kepala Bagian Pengendalian Operasi (Kabagdalops), Kepala Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (Kasubbagpullahjianta), Staf Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops), Kepala Siaga (Ka Siaga) Polda DIY, Perwira Siaga (Pa Siaga) Polda DIY, dan Bintara Siaga (Ba Siaga) Polda DIY. Sumber data dalam penelitian sebanyak 7 (Tujuh) orang.

b. Tempat/Peristiwa

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah upaya komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dalam menghimpun laporan

kejadian gangguan kamtibmas di wilayah DIY. Sehingga penulis akan mengetahui bagaimana strategi komunikasi organisasi yang telah diterapkan untuk mendapatkan data terkait kejadian gangguan kamtibmas.

c. Dokumen/Arsip

Dokumen atau arsip yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan data kejadian gangguan kamtibmas, yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Pengendalian Operasi, lembar formulir (jurnal), buku mutasi, dan data-data terkait tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Adapun teknik observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung yaitu penulis mengamati secara langsung proses menghimpun data kejadian gangguan kamtibmas di Kantor Bagdalops Biro Operasi Polda DIY.

b. Wawancara mendalam (In-deept Interviewing)

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan

informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan dengan cara berulang-ulang dan intensif (Burhan Bungin 2011).

Dalam wawancara mendalam, penulis menggunakan teknik pengambilan *sample purposive sampling*. Karena *purposive sampling* dinilai lebih mampu mengambil kelengkapan dan kedalaman data dalam mengambil realitas yang tidak tunggal (fokus penelitian lebih dari satu sampel). Pengambilan sampel ditujukan kepada sumber data yang dinilai berkompeten yang berhubungan dalam penelitian ini (Burhan Bungin 2011).

Wawancara yang dilakukan oleh penulis disini adalah wawancara dengan Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY, dengan cara wawancara informal yaitu wawancara dalam suasana yang biasa dan wajar, juga dengan wawancara baku terbuka yaitu wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan laporan kejadian gangguan kamtibmas di Bagdalops Biro Operasi Polda DIY, yaitu berupa catatan hasil wawancara kita, rekaman wawancara, foto-foto dan dokumentasi lainnya yang mempermudah untuk mendapatkan data penelitian.

d. Studi Pustaka

Teknik studi pustaka, yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian dengan cara mencari sumber-sumber literatur mengenai komunikasi maupun data-data yang berhubungan dengan data di kantor Bagdalops Biro Operasi Polda DIY, melalui jurnal, buku, majalah, surat kabar dan informasi tertulis lainnya sebagai referensi dalam proses pengumpulan data. Teknik ini digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang diperoleh dari informan.

5. Teknik Sampling

Pada penelitian ini, di dalam memilih informan menggunakan teknik purposive. Yang dimaksudkan disini adalah informan yang diwawancarai adalah petugas yang benar-benar memahami dan mengetahui obyek penelitian sehingga dapat memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti, berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Bagian Pengendalian Operasi (Kabagdalops), Kepala Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (Kasubbagpullahjianta), Staf Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops), Kepala Siaga (Ka Siaga) Polda DIY, Perwira Siaga (Pa Siaga) Polda DIY, dan Bintara Siaga (Ba Siaga) Polda DIY.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Patton (Moleong, J. Lexy. 2006 : 280) dalam metode penelitian Kualitatif adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide tersebut.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman (1992:16) dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan dalam analisis model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Sehingga

data yang diambil adalah benar-benar yang dibutuhkan saja, dan yang tidak dibutuhkan bisa di kesampingkan.

- b. Penyajian data (*data display*), yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Dari penelitian di atas maka penulis menganalisa data dengan langkah sebagai berikut : melakukan analisis data secara terus-menerus sejak awal penelitian dan selama proses penelitian, setelah data berhasil dikumpulkan melalui pengamatan langsung (*observasi*), wawancara dengan petugas dan mendapatkan arsip/dokumen, maka kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan peneliti agar lebih fokus pada rumusan masalah yang ingin dicapai, selanjutnya mereduksi data, kemudian disimpulkan dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan

menggambarkan obyek penelitian di Kantor Bagdalops Biro Operasi Polda DIY.

7. Validitas Data

Untuk melengkapi dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004:178).

Triangulation menurut Patton (dalam Moleong, 2004:178–179) dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

- a. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Data yang diperoleh berupa wawancara yang dilakukan lebih dari satu kali dalam periode waktu tertentu.
- b. Triangulasi Metode, yaitu dengan menggunakan dua strategi; (1) pengecekan terhadap derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi Peneliti, yakni dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan. Pengambilan data dilakukan oleh beberapa orang.

- d. Triangulasi Teori, yakni melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisa dengan menggunakan beberapa perspektif teori yang berbeda.

Pada penelitian ini, variasi teknik yang digunakan adalah triangulasi model sumber. Hal ini dilakukan karena pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan terhadap Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY. Langkah-langkah yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta mengcross check lagi dengan petugas dan masyarakat yang berbeda, sehingga validitas data akan ditemukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat Berdirinya Polda DIY

Polda D.I. Yogyakarta berdiri berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/08/IX/1996 tanggal 16 September 1996, yang dahulu bernama Kepolisian Wilayah (POLWIL) Yogyakarta dinaikkan tingkatnya menjadi Kepolisian Daerah (POLDA) D.I. Yogyakarta dengan pringkat type C. Dalam perkembangannya, melihat data kejadian gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah D.I. Yogyakarta yang semakin tahun semakin meningkat, maka Polda D.I. Yogyakarta dinaikkan tingkatnya dari type C menjadi type B dengan dikeluarkannya Keputusan Menhankam/Panglima TNI No. Pol. : Kep/14/VIII/1999 tanggal 30 Agustus 1999 tentang Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta mengalami Validasi dari type C menjadi type B. Sehingga pimpinan dan struktur organisasinya pun mengalami perubahan, jika type C dipimpin oleh seorang yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) sedangkan type B dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

Pada tahun 2002, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Pemisahan Polri dari kesatuan ABRI, maka struktur organisasinya pun disesuaikan dengan kemandirian Polri saat itu. Sehingga pimpinan tertinggi Polri dalam hal ini Kapolri mengeluarkan Keputusan No. Pol. : Kep/54 /X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang perubahan struktur Polda

termasuk Polda D.I. Yogyakarta. Dari riwayat perkembangan Polda D.I. Yogyakarta ini tentunya membawa dampak/konsekuensi baik dari segi organisasi dan sumber daya manusia untuk lebih meningkatkan dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta.

Pada bulan Desember 2018 Polda D.I. Yogyakarta dinaikkan type, dari type B menjadi type A yang Kepala Kepolisian nya dari berpangkat Brigjen Pol (Jenderal Bintang Satu) menjadi berpangkat Irjen Pol (Jenderal Bintang Dua).

Dalam perkembangannya untuk menyesuaikan tingkat kejahatan dan ancaman gangguan kamtibmas maka diterbitkanlah Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah. Sehingga Polda D.I. Yogyakarta dan Jajarannya menyesuaikan dengan peraturan Kapolri yang terbit di tahun 2018 ini.



MAPOLDA DIY

B. Struktur Organisasi Polda DIY

Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta atau Polda DIY merupakan bagian dari organisasi Polri yang bertugas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda DIY mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas Polri secara keseluruhan. Baik dalam bidang penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat serta keamanan dan ketertiban umum. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan tugas-tugasnya, Polda DIY mempunyai visi, misi maupun strategi dalam setiap aktivitasnya.

Sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf kewilayahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda DIY berusaha untuk mewujudkan visi dan misinya melalui beberapa sarana guna mendorong tercapainya tujuh program yang telah didasarkan pada prioritas kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran Polda DIY, yaitu :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepolisian.
2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana.
3. Program Kerjasama Keamanan.
4. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.
5. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.
6. Program Pemeliharaan Kamtibmas.
7. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

Oleh karena itu, Polda DIY berupaya mengadakan peningkatan mutu atau perubahan sistem dalam pelayanan terhadap masyarakat, dengan penekanan pada :

1. Partisipasi

Partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingan atas dasar kebebasan berorganisasi dan berbicara.

2. *Rule of Law*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, khususnya di dalam penyidikan dan penyelidikan terutama hukum hak asasi manusia.

3. *Administrative Competance and Tranparancy*

Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif serta keterbukaan informasi.

4. *Responsiveness*

Setiap proses atau kebijakan Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta harus mencoba untuk melayani setiap *stokeholder*, tanggap akan kebijakan tingkat atas.

5. *Consensus Orientation*

Polda DIY harus dapat menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas

dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur. Dengan kata lain Kepolisian harus dapat beraktivitas dalam situasi dan kondisi apapun.

6. *Equite*

Semua anggota Polda DIY mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. *Effectiveness and Efficiency*

Polda DIY dalam pencapaian tujuan organisasi harus sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang telah tersedia sebaik mungkin.

8. *Accountability*

Polda DIY harus dapat memberikan pertanggungjawaban pada setiap tindakan kepada stakeholders dan masyarakat.

9. *Strategic Vision*

Para stokeholder Polda DIY harus mempunyai perspektif *good governance* (kepemerintahan yang baik) serta pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan organisasi.

Dengan mempelajari faktor-faktor eksternal dan internal yang ada pada Kepolisian Daerah, maka Polda DIY mempunyai rencana strategis sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kualitas personil dalam menjalin koordinasi dengan instansi terkait, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

2. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di dalam upaya pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menurunkan tingkat kerawanan sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada organisasi Polda DIY.
3. Mengoptimalkan kinerja Polda DIY meliputi sumber daya personil di dalam menghadapi situasi politik yang tidak stabil, sikap masyarakat yang semakin reaktif dan munculnya perkembangan kriminalitas yang berteknologi (*Dimension of New Crime*).
4. Meningkatkan sumber daya financial agar dapat memenuhi sarana dan prasarana seiring kemajuan teknologi.



Kegiatan Polda DIY pada Apel Gelar Pasukan persiapan Operasi Kepolisian

C. Kedudukan dan Fungsi Polda DIY

Secara lengkap dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Kedudukan

Kedudukan Organisasi Polda DIY didasarkan kepada :

- a. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Revisi Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 berkaitan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

2. Kedudukan dan Fungsi

Kepolisian Daerah adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf kewilayahan yang berkedudukan di bawah Kapolri. Kapolda DIY bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan komando dan pengendalian, meliputi operasional dan pembinaan satuan kerja dan jajarannya.

Fungsi dari Polda DIY meliputi :

- a. Pemberian arah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana/ program kerja dan kegiatan Polda, guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda DIY.

- b. Pemantauan/pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas operasional wilayah Polda DIY yang meliputi fungsi-fungsi Intelijen keamanan, Reserse kriminal, Samapta, Lalu lintas dan Pembinaan kemitraan.
- c. Pemberian dukungan (*back up*) operasional kepada Polres, baik melalui pengerahan kekuatan antar Polres dalam jajarannya, atau penggunaan kekuatan bantuan dari Polda.
- d. Penyelenggaraan operasi khusus kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dipandang perlu.
- e. Pemantauan/pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polda khususnya pembinaan personil sesuai lingkungan kewenangannya.
- f. Penjabaran kebijakan dan penindaklanjutan perintah/atensi Kapolda.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Polda DIY terdiri dari tingkat Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) dan Unsur Pelaksana Utama Kewilayahan Daerah adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) DIY. Struktur organisasi Mapolda DIY terdiri dari :

a. Unsur pimpinan :

- 1) Kepala Kepolisian Daerah disingkat Kapolda.

Tugas Kapolda adalah :

- a) Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda.
 - b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolri.
- 2) Wakil Kepala Kepolisian Daerah disingkat Wakapolda.
- Tugas Wakapolda adalah :
- a) Membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda.
 - b) Memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.
- b. Unsur pengawas dan pembantu Pimpinan terdiri atas :
- 1) Inspektorat Pengawasan Daerah disingkat Itwasda.
 - 2) Biro Operasi disingkat Roops.
 - 3) Biro Perencanaan dan Anggaran disingkat Rorena.
 - 4) Biro Sumber Daya Manusia disingkat Ro SDM.
 - 5) Biro Logistik disingkat Rolog.
 - 6) Bidang Profesi dan Pengamanan disingkat Bidpropam.
 - 7) Bidang Hubungan Masyarakat disingkat Bidhumas.
 - 8) Bidang Hukum disingkat Bidkum.
 - 9) Bidang Telekomunikasi dan Informasi Kepolisian disingkat Bid TIK.
- c. Unsur Pelayan Pimpinan terdiri atas :
- 1) Staf Pribadi Pimpinan disingkat Spripim.

- 2) Sekretariat Umum disingkat Setum.
 - 3) Pelayanan Markas disingkat Yanma.
- d. Unsur Pelaksana Tugas Pokok :
- 1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu disingkat SPKT.
 - 2) Direktorat Intelijen dan Keamanan disingkat Ditintelkam.
 - 3) Direktorat Reserse Kriminal Umum disingkat Ditreskrim.
 - 4) Direktorat Reserse Kriminal Khusus disingkat Ditreskrimsus.
 - 5) Direktorat Reserse Narkoba disingkat Ditresnarkoba.
 - 6) Direktorat Pembinaan Masyarakat disingkat Ditbinmas.
 - 7) Direktorat Samapta disingkat Ditsamapta.
 - 8) Direktorat Lalu Lintas disingkat Ditlantas.
 - 9) Direktorat Pengamanan Obyek Vital disingkat Ditpamobvit.
 - 10) Direktorat Polisi Perairan dan Udara disingkat Ditpolairud.
 - 11) Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti disingkat Dittahti.
 - 12) Satuan Brimob disingkat Satbrimob.
- e. Unsur Pendukung :
- 1) Sekolah Polisi Negara disingkat SPN.
 - 2) Bidang Keuangan disingkat Bidkeu.
 - 3) Bidang Kedokteran dan Kesehatan disingkat Biddokkes.
 - 4) Rumah Sakit Bhayangkara disingkat Rumkit Bhayangkara.
- f. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan :
- 1) Kepolisian Resor disingkat Polres.
 - 2) Kepolisian Sektor disingkat Polsek.

D. Visi dan Misi Polda DIY

Polda D.I. Yogyakarta telah melakukan reformasi melalui redefinisi, reposisi dan restrukturisasi kelembagaan, juga konsisten terhadap tugas pokoknya saat ini telah berperan penting dalam upaya peningkatan layanan Harkamtibmas, pencegahan kejahatan dan penegakan hukum serta dalam pemberian perlindungan, pelayanan, pengayoman dan kepada masyarakat.

Reformasi menghadapi masa depan yang makin kompleks di tahun 2020 - 2024 tindaklanjut dari Reformasi Polda DIY tahun 2015 - 2019 yang masih relevan, ditambah tuntutan masyarakat yang makin cerdas dan kritis, maka Polda D.I. Yogyakarta telah melakukan reformasi mental perilaku personel dan mereformasi pola kerja berdasarkan nilai-nilai :

1. Keunggulan (*excellence*) yang berorientasi pada prestasi (*achievement*), dedikasi kejujuran (*honesty*), inovatif dan kreativitas.
2. Integritas (*integrity*) orientasi pada komitmen menjunjung nilai-nilai etika dan moral (*ethic value and morality*).
3. Akuntabilitas (*accountable*) berorientasi pada sistem yang *traceable* (dapat diaudit dan dapat diperbaiki).
4. Transparansi orientasi pada keterbukaan (*openness*), kepercayaan (*trust*), menghargai keragaman dan perbedaan (*diversity*) serta tidak diskriminatif.
5. Berkelanjutan berorientasi kepada perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Nilai-nilai tersebut di atas menjadi tanggung jawab bersama semua personel, mulai dari pimpinan sampai personel terbawah (staf) untuk mewujudkan kegiatan tugas pokok dan fungsi dari organisasi yang telah diamanatkan Undang-Undang, maka visi misi Polda D.I. Yogyakarta tahun 2020-2024 dilanjutkan untuk 5 tahun kedepan dan akan disempurnakan bila ada kebijakan pimpinan pusat.

1. Visi Polda DIY :

“Memayu Hayuning Bawono Menuju Terwujudnya Yogyakarta Yang Aman Dan Bermartabat”.

2. Misi Polda DIY :

Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat serta mendukung Yogyakarta menuju peradapan dunia.



Pasukan Patroli Roda Dua Personel Polda DIY siap siaga pada saat Apel

E. Biro Operasi Polda DIY

Biro Operasi (Roops) Polda DIY merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolda dengan tugas pokoknya membantu Kapolda dalam bidang pengkajian strategis, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu dan kerja sama lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah pada tingkat Polda.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Operasi Polda DIY menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan.
2. Penyiapan dan/atau perumusan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu.
3. Pelaksanaan pengkajian strategi terhadap lingkungan strategis.
4. Pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu yang meliputi perencanaan, administrasi, pelaksanaan dan pengendalian.
5. Pembinaan manajemen pelatihan pra operasi termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian.
6. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta pemberian arahan tingkat kewilayahan.

7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu dalam bentuk asistensi, supervisi dan dukungan administrasi atas pelaksanaan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu tingkat kewilayahan.
8. Pengoordinasian, pengadministrasian, termasuk pengumpulan, pengolahan, penyajian data operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas dan pelaporan pada pimpinan.
9. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi serta pengawasan dan mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama yang dijalin antara Polda dan mitranya serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Biro Operasi Polda DIY dalam struktur organisasinya mempunyai sub satker yang berada di dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

Bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Roops.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja,

LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- b. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel.
- c. Pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN.
- d. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung-jawaban keuangan.
- e. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh :

- a. Urusan Perencanaan (Urren), bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker.
- b. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.
- c. Urusan Keuangan (Urkeu), bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

2. Bagian Pembinaan Operasi (Bagbinops)

Bertugas menyiapkan dan/atau merumuskan rencana operasi, melaksanakan pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan

kepolisian terpadu serta koordinasi lintas sektoral. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinops menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan dan/atau perumusan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu.
- b. Pelaksanaan pengkajian strategi terhadap lingkungan strategis.
- c. Penyiapan dan perumusan rencana operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu.
- d. Pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu.
- e. Pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektoral dan tindakan kontinjensi.
- f. Pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian latihan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan latihan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagbinops dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Operasi (Subbagrenminops), bertugas menyiapkan dan/atau merumuskan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu, melaksanakan pengkajian strategi terhadap lingkungan strategis serta menyiapkan, merumuskan dan merencanakan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu dalam bentuk administrasi dan koordinasi.

- b. Sub Bagian Pembinaan dan Pelatihan Operasi (Subbagbinlatops), bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengendalikan dan membina latihan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan latihan.

3. Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops)

Bertugas membina, menyelenggarakan koordinasi dan administrasi, mengendalikan operasi, kegiatan kepolisian terpadu serta mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu. Dalam melaksanakan tugas, Bagdalops menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengkoordinasian, pengadministrasian, dan pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu.
- b. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi, dokumentasi kegiatan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu.
- c. Pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas, penerimaan data laporan kejadian dan laporan kegiatan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta penyusunan laporannya.
- d. Pelaksanaan Anev situasi Kamtibmas secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas, Bagdalops dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (Subbagpullahjianta), bertugas membina, mengoordinasikan,

mengadministrasikan dan mengendalikan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta melaksanakan Anev situasi Kamtibmas secara berkala.

- b. Siaga, bertugas melakukan pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas, penerimaan data laporan kejadian dan laporan kegiatan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta penyusunan laporannya.

4. Bagian Kerja Sama (Bagkerma)

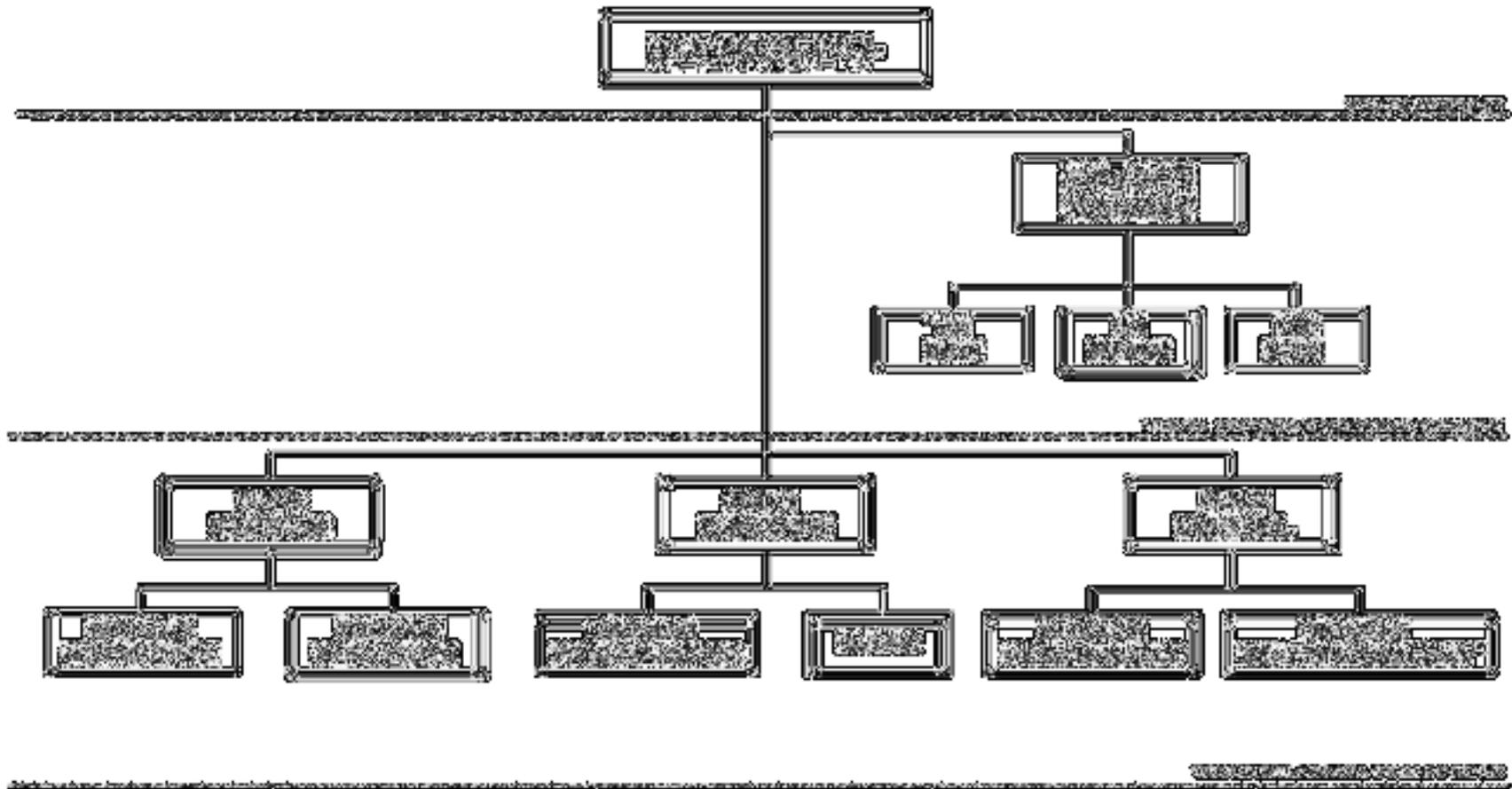
Bertugas menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas, Bagkerma menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi.
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi.
- c. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kerja sama yang dijalin antara Polda dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagkerma dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Kesepakatan Kerja sama (Subbagpakatkerma), bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi.
- b. Sub Bagian Koordinator Program dan Monitoring Evaluasi (Subbagkooorprogmovev), bertugas melaksanakan koordinasi program kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi serta Satuan fungsi terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO OPERASI POLDA DIY



F. Visi dan Misi Biro Operasi Polda DIY

1. Visi Biro Operasi

Terwujudkan Biro Operasi Polda D.I. Yogyakarta sebagai pembina dan penyelenggara manajemen bidang operasi yang unggul dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung terciptanya jogja istimewa sebagai kota pusaka (*Heritage City*).

2. Misi Biro Operasi

Berdasarkan Visi tersebut di atas, selanjutnya Biro Operasi Polda D.I. Yogyakarta menetapkan Misi yang merupakan pedoman sekaligus batasan tugas sehari-hari sebagai berikut :

- a. Penyiapan dan/atau perumusan kebijakan Kapolda D.I. Yogyakarta di bidang operasi.
- b. Menyelenggarakan manajemen Operasi Kepolisian serta tindakan Kontinjensi yang meliputi perencanaan, koordinasi, penyiapan administrasi, analisa dan evaluasi serta pengendalian secara efektif dan efisien.
- c. Menyelenggarakan manajemen pelatihan satuan lintas fungsi, pelatihan Pra Operasi dan Kerjasama pelatihan secara lintas sektoral (gladi lapang) dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Operasi.

- d. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data operasi serta data gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Menjaga dan mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah D.I. Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar, kota wisata dan kota perjuangan serta mendorong terciptanya Jogja Istimewa.
- f. Menindaklanjuti setiap laporan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dari satuan kewilayahan.
- g. Menindaklanjuti kebijakan Kapolda D.I. Yogyakarta yang berhubungan dengan penyelenggaraan manajemen operasi Kepolisian Terpusat maupun Kewilayahan dalam rangka untuk menanggulangi berbagai tindak kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara atau yang berimplikasi kontinjensi.
- h. Melaksanakan kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan secara maksimal.
- i. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan kesatuan fungsi lain atau instansi terkait dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk terhadap terjadinya Bencana Alam.

G. Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops) Biro Operasi Polda DIY

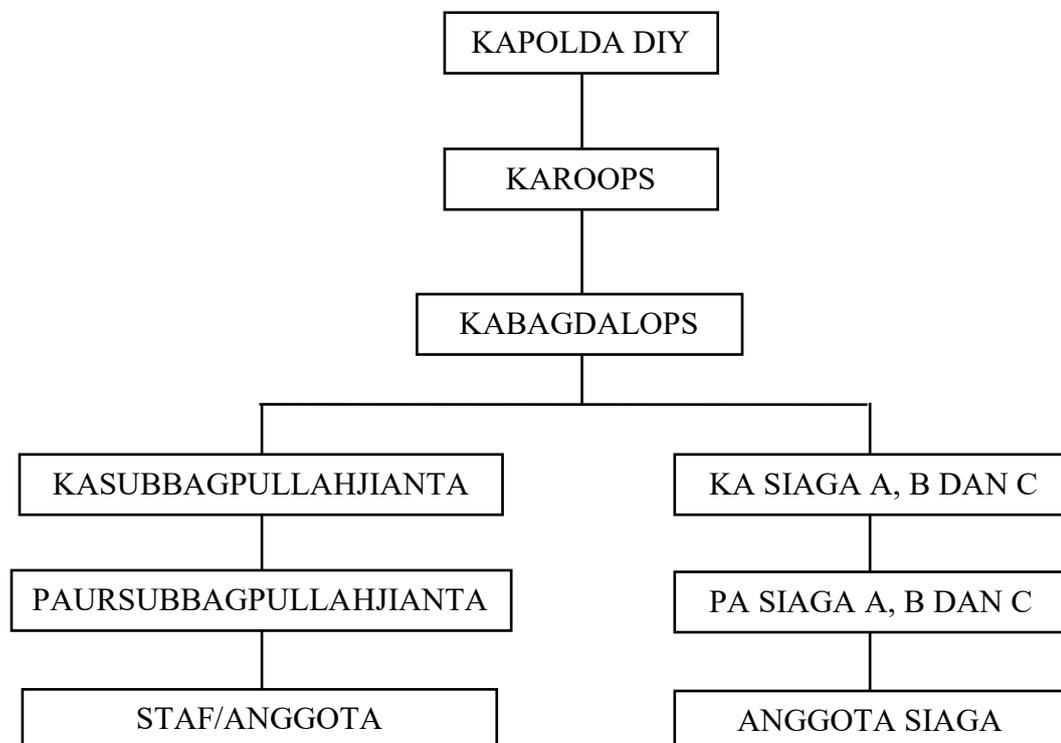
Bagdalops Biro Operasi Polda DIY merupakan bagian di bawah satuan kerja Biro Operasi yang satu satunya bertugas sebagai Penerima data laporan kejadian, laporan kegiatan operasi, dan penyusunan laporannya. Bagdalops Biro Operasi Polda DIY menghimpun data kejadian gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah D.I. Yogyakarta setiap saat, dan dilaporkan ke satuan atas (Mabes Polri) maupun Pimpinan Polda DIY selama 1 x 24 jam (setiap hari). Sehingga laporan dari Bagdalops Biro Operasi Polda DIY disebut sebagai laporan harian. Selain laporan harian Bagdalops Biro Operasi Polda DIY juga menghimpun data kejadian gangguan kamtibmas yang sifatnya insidental (kejadian menonjol) yang biasa disebut dengan laporan segera dan laporan kemajuan. Laporan segera karena sifatnya yang mendesak dan perlu dilaporkan ataupun diminta oleh Pimpinan. Laporan kemajuan merupakan kelanjutan dari laporan segera, yang sifatnya memberikan *up date* tentang data kejadian yang sebelumnya sudah dilaporkan.

Laporan kejadian gangguan kamtibmas yang dihimpun oleh Bagdalops Biro Operasi Polda DIY, harus memenuhi unsur-unsur : apa yang terjadi, dimana terjadi, kapan terjadi, siapa pelaku, dan siapa korban/saksi. Kelima unsur tersebut merupakan pokok masalah yang harus terpenuhi dalam mencari/menghimpun data, walaupun uraian data masih bisa dikembangkan lagi sesuai dengan karakteristik kejadian.

Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dalam mencari data kejadian gangguan kamtibmas, dituntut :

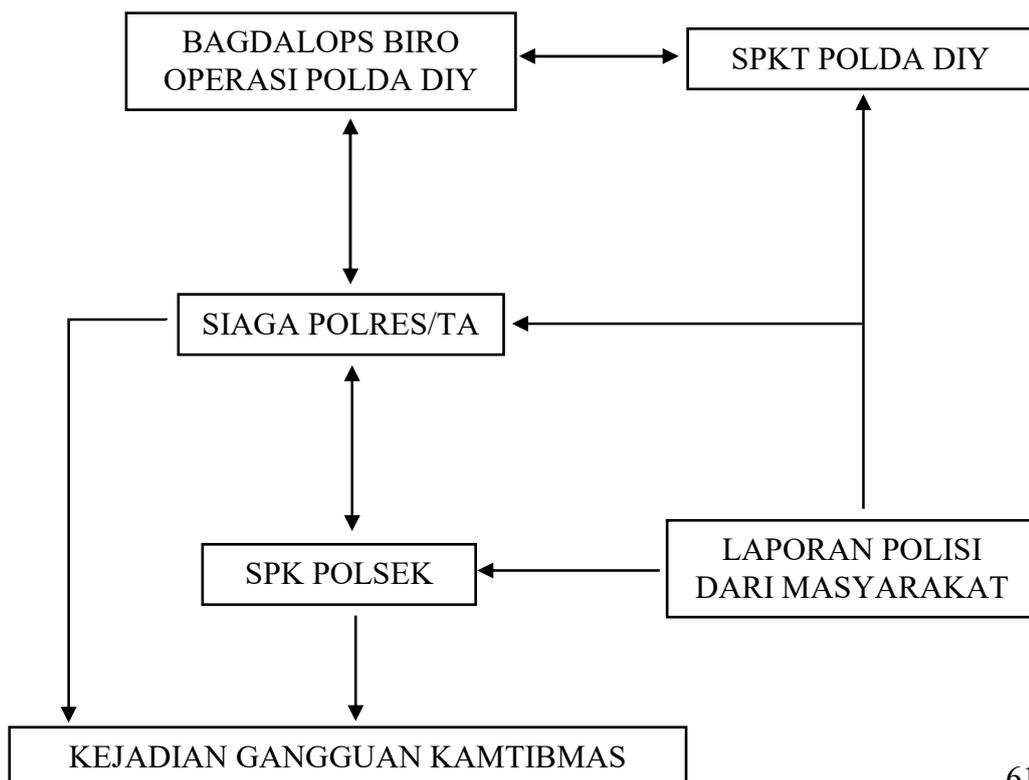
1. Cepat, yaitu data/informasi yang disajikan tepat waktu.
2. Tepat, yaitu data/informasi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Akurat, yaitu data/informasi yang disajikan secara lengkap baik kuantitas maupun kualitas.
4. Aman, yaitu data/informasi yang disajikan dijamin kerahasiaan.
5. Akuntabel, yaitu data/informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

STRUKTUR ORGANISASI BAGDALOPS BIRO OPERASI POLDA DIY



Bagdalops dipimpin oleh Kabagdalops yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), dan dibantu oleh Kasubbagpullahjianta yang berpangkat Komisaris Polisi (Kopol), Ka Siaga yang terdiri dari 3 regu yaitu Regu A, B dan C yang berpangkat Komisaris Polisi (Kopol). Dibawah Kasubbagpullahjianta dibantu oleh Paursubagpullahjianta yang berpangkat Ajun Komusari Polisi (AKP) atau boleh dijabat oleh PNS Golonga IIIC/IIID, dan dibantu oleh Staf yang berpangkat Bintara atau PNS Golongan II. Setiap regu, Ka Siaga dibantu oleh dua orang perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang disebut Pa Siaga dan Pamin Siaga, dan tiga orang Bintara Siaga.

Garis komando Anggota Bagdalops Biro Operasi Polda DIY dalam mencari data yaitu dari satuan bawah (Polres/Polresta) dalam hal ini Siaga Polres/Polresta maupun dari garis horisontal yaitu dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda DIY.



Dalam menghimpun laporan, Bagdalops Biro Operasi Polda DIY memperoleh dari SPKT Polda DIY dan dari Siaga Polres/Polresta secara berjenjang (Polres/Polresta mendapatkan data laporan dari SPK Polsek atau dengan mendatangi langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadinya Gangguan Kamtibmas).



Polwan Polda DIY membagikan masker kepada Pengemudi Ojek Online



Kapolda DIY meninjau kegiatan Vaksinasi Massal yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY

H. Gangguan Kamtibmas

1. Pengertian Gangguan Kamtibmas

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Sedangkan gangguan adalah sesuatu yang dapat menghalang-halangi suatu proses/kegiatan, baik itu berupa hambatan, tantangan, ancaman maupun rintangan.

Penggolongan data gangguan Kamtibmas terdiri dari golongan :

- a. Kejahatan.
- b. Pelanggaran.
- c. Gangguan terhadap ketenteraman/ketertiban umum.
- d. Bencana.

2. Penggolongan Kejahatan

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2009, jenis-jenis kejahatan digolongkan menjadi 5 bentuk, yakni :

- a. Kejahatan konvensional/nasional

Kejahatan konvensional/nasional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri.

b. Kejahatan lintas batas negara (*transnational crimes*)

Kejahatan lintas batas negara (*transnational crimes*) adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global.

c. Kejahatan terhadap kekayaan negara

Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan).

d. Kejahatan berimplikasi kontijensi

Kejahatan berimplikasi kontijensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.

e. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara

melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak akan mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.



Satuan Brimob Polda DIY saat mengikuti Apel Kesiapsiagaan Bencana

DAFTAR PUSTAKA

- Budyatna Muhammad, Prof, Dr. MA & Mona Ganiem Leila, Dr, M.Si. *Teori Komunikasi Antarpribadi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Cetakan ke-2 2012.
- Burhan, Bungin, 2011, *Sosiologi Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya – Bandung.2008.
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press Surakarta Indonesia, 2002.
- Hafied Cangara, *Edisi Revisi, Pengantar Ilmu Komunikasi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007.
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya – Bandung, 2010.
- Littlejohn W. Stephen & Fossall A. Karen, *Teori Komunikasi : Theories of Human Communication*, Penerjemah : Mohammad Yusuf Hamdan, Jakarta : Salemba Humanika, Cetakan kesembilan, 2012.
- Muhammad Arni, Dr., *Komunikasi Organisasi*, Penerbit Bumi Aksara, 2004.
- Mulyana Deddy, Prof. Dr. M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan ketujuh, 2010.
- Moleong, J.Lexy, Prof, Dr. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Onong Uchjana Effendy, *Komunikasi Teori dan Praktek*, Penerbit : PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Peraturan Kapolri Nomor 07 tahun 2009 tanggal 29 April 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.

Rosady Ruslan, 2005 Kiat dan Strategi Kampanye Publik Relations PT Raja
Grafindo Persada Jakarta.

Sumber lain :

www.polri.go.id

www.jogjapolri.go.id